

MASJID BESAR RAJA HAJI ABDUL GHANI PULAU BURU KEPULAUAN RIAU

Nurman Kholis

Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang
dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia

nukhdata@yahoo.com

Abstract. *Many Muslims in the Riau Islands do not know the history of the development of Islamic theory from the center of power to spread to various corners. This is as the existence of the Great Mosque of Raja Haji Abdul Ghani (MBRHAG) on Buru Island, Karimun. Thus, to uncover the existence of this mosque, qualitative research methods are used so that history, architecture, and socio-religious functions can be known. Based on the results of the study it was concluded that the establishment of MBRHAG was initiated by Raja Haji Abdul Ghani. He was the first Amir (sub-district level government) of the kingdom of Riau-Lingga on Buru Island, in the 19th century. The architecture is a Chinese. Therefore, on the right side of this mosque is around 200 m, there is also the Sam Po Teng Temple and the Tri Dharma Dewa Bumi. Thus, the close location of the mosque with Chinese and Confucian worship houses's shows a harmonious relationship between Malay Muslims and Chinese Buddhists. In fact, in the continuation of this relationship there was information that a Chinese Buddhist had joined a Muslim friend to fast for half a month of Ramadan.*

Keywords: *Mosque, Malay Muslims, Chinese Buddhists/Confucians, Harmonious Relations*

Abstrak. *Umat Islam di Kepulauan Riau banyak yang tidak mengenal sejarah perkembangan ajaran Islam dari pusat kekuasaan hingga tersebar ke berbagai pelosok. Hal ini sebagaimana keberadaan Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani (MBRHAG) di Pulau Buru, Karimun. Dengan demikian, untuk mengungkapkan keberadaan masjid ini digunakan metode penelitian kualitatif agar dapat diketahui sejarah, arsitektur, dan fungsi sosial keagamaannya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pendirian MBRHAG diprakarsai oleh Raja Haji Abdul Ghani. Ia adalah Amir (pemerintah setingkat kecamatan) pertama kerajaan Riau-Lingga di Pulau Buru, pada abad ke-19. Adapun arsitekturnya adalah seorang Tionghoa. Karena itu, di sebelah kanan masjid ini sekitar 200 m juga terdapat Kelenteng Sam Po Teng dan cetya Tri Dharma Dewa Bumi. Dengan demikian, dekatnya lokasi masjid dengan rumah ibadah umat Tionghoa dan Khonghucu ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara muslim Melayu dengan Budhis Tionghoa. Bahkan, dalam kelangsungan hubungan ini terdapat informasi seorang Budhis Tionghoa pernah ikut temannya yang beragama muslim untuk berpuasa selama setengah bulan Ramadhan.*

Kata Kunci: *Masjid, Muslim Melayu, Budhis/Khonghucu Tionghoa, Hubungan Harmonis*

Pendahuluan

Rukun Islam yang kedua adalah shalat. Kata ini secara bahasa berarti doa dan dalam istilah ilmu fiqh merupakan serangkaian ibadah (pengabdian) khusus yang dimulai dengan *takbir* (pengucapan “Allahu Akbar” yang berarti “Allah Maha Besar”) dan diakhiri dengan *taslim* (pengucapan “salam”). Salah satu aktivitas dalam shalat adalah *sujud* yaitu gerakan secara lahir dengan meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan kaki ke bumi. Kata ini berasal dari *sajada* yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim. Turunan dari kata *sajada*, selain sujud juga adalah *masjid* yang berarti “tempat bersujud”. Karena itu, dalam pengertian sehari-hari masjid merupakan bangunan tempat shalat kaum Muslim.

Perkembangan fungsi masjid sendiri telah berlangsung sejak Nabi Muhammad saw masih hidup. Ada masjid yang berfungsi sebagai tempat salat dan juga sekaligus sebagai tempat menerima wahyu yang diteruskan oleh Nabi sebagai ajaran kepada umatnya di tempat yang sama pula. Hal ini seperti masjid Nabawi di Madinah. Dengan demikian, fungsi masjid bertambah menjadi tempat untuk pelaksanaan dakwah dan tempat pendidikan agama Islam. Kegunaan masjid lebih berkembang lagi setelah Nabi Muhammad saw wafat. Ada masjid yang dipakai untuk tempat berhimpunnya laskar muslim dalam mempersiapkan segala keperluannya sehingga sehingga dinamakan masjid askar. Saat pengaruh dan kemajuan Islam telah jauh memasuki negara-negara di luar Arab, para sultan dan penguasa suatu negara yang telah memeluk agama Islam membangun mesjidnya dengan penampilan yang megah, besar, dan berwibawa. Penampilannya juga mewakili kekuasaan negara, tempat

bangunan masjid itu didirikan (Tugiyoso, 2006: 14-15).

Di samping masjid resmi dan besar yang biasanya dibangun di kota besar atau pusat keramaian juga terdapat masjid yang ukurannya lebih kecil di pemukiman yang jauh letaknya dari masjid besar. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pembagian di antara kedua macam masjid ini. Masjid yang berukuran besar dan ada di pusat keramaian selain digunakan untuk salat berjamaah harian juga digunakan untuk salat berjamaah pada hari Jumat dan hari raya sehingga kemudian menjadi mesjid jami.

Masjid-masjid tersebut setelah Nabi Muhammad saw wafat banyak yang didirikan untuk memperingati beliau. Hal ini seperti di jalan antara Mekkah dan Madinah. Sepanjang jalan tersebut, terdapat tempat bekas ia melakukan shalat waktu perang parit, maka di situlah di bangun masjid. Demikian juga pada jejak telapak binatang kendaraan Nabi yang masih tampak di batu, maka dibangunlah masjid al-Baghla di Madinah. Hal yang sama juga seperti masjid Al-Ijaba tempat yang padanya seruan Nabi pernah terjawab dan masjid al-Fath yang mengingatkan atas Mekah dan lain-lain. Karena itu, Imam Ghazali pernah mengunjungi 30 masjid yang didirikan untuk mengenang Nabi dan para sahabatnya di kedua kota tersebut (Tugiyoso, 2006: 17).

Tradisi membangun masjid yang dimaksudkan untuk mengenang orang besar, ulama besar, orang yang memiliki karamah, bahkan ada pula yang berhubungan dengan para Nabi terdahulu juga berkembang ke luar kota Mekah dan Madinah. Hal ini seperti ada empat mesjid Musa di Mesir dan juga masjid Ya’kub, Masjid Ibrahim, dan masjid Sulaiman (Tugiyoso, 2006: 17). Demikian juga di Indonesia, banyak masjid yang didirikan juga sekaligus

untuk mengenang nama sultan atau ulama yang berjasa dalam menyebarkan ajaran Islam. Salah satu masjid yang didirikan dengan maksud tersebut yaitu Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani (selanjutnya disingkat MBRHAG) yang berlokasi di Pulau Buru, Karimun, Kepulauan Riau. Lokasi masjid ini berdekatan dengan Klenteng yang berjarak sekitar 200 m. Karena itu, para pengurus MBRHAG diasumsikan turut serta membangun relasi umat Islam Melayu dengan umat Konghuchu/Buddha keturunan Tionghoa di Pulau Buru, Karimun, Kepulauan Riau.

Permasalahan

Pada umumnya kaum Muslimin di Indonesia kurang memperhatikan sejarah perkembangan umat Islam termasuk di dalamnya sejarah pendirian masjid. Kalau pun mereka sekilas mengetahui sejarah masjid, biasanya masjid yang dikenal itu berada dalam pusat kekuasaan atau ibu kota kesultanan pada masa silam. Dengan demikian, kebanyakan mereka juga tidak mengenal bagaimana sejarah perkembangan ajaran Islam dari pusat kekuasaan tersebut hingga tersebar ke berbagai pelosok melalui pendirian berbagai masjid, sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau.

Karena itu, umat Islam di propinsi ini kebanyakan mengenal masjid di Pulau Penyengat dan juga masjid di Lingga. Hal ini sehubungan dengan kedua masjid ini yang berada di pusat pemerintahan Kesultanan Lingga pada masa silam. Karena itu, umat Islam di propinsi ini diasumsikan banyak yang tidak mengetahui sejarah dan arsitektur masjid Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani di pulau Buru. Demikian juga bagaimana masjid ini berfungsi dalam membina para jama'ahnya dalam membangun relasi

dengan orang-orang yang bersuku berbeda dan juga berbeda agama, diasumsikan tidak banyak diketahui oleh umat Islam khususnya di kepulauan Riau. Hal ini sebagaimana kehadiran orang-orang keturunan Tionghoa yang beragama Buddha dan Konghuchu berikut cetya/klenteng yang berdiri sekitar 200 m di sebelah kanan MBRHAG.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka masalah utama dalam artikel ini adalah, tentang bagaimana sejarah pendirian dan perkembangan MBRHAG?; bagaimana arsitektur masjid MBRHAG?; dan bagaimana peran MBRHAG dalam membangun relasi umat Islam Melayu dengan Buddhis dan Konghuchu Tionghoa di pulau Buru?

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun metode analisisnya digunakan dengan pendekatan kualitatif. Analisis ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan keberadaan masjid dari perspektif sejarah dan arsitektur serta fungsi sosial keagamaannya. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap MBRAG.

Teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan seputar MBRHAG kepada nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui latar belakang sejarah, fungsi sosial masjid ini khususnya dalam membangun relasi umat Islam dengan umat Buddha/Konghucu di Pulau Buru, Karimun, Kepulauan Riau. Sementara itu, studi pustaka juga dilakukan dengan membaca berbagai literatur yang secara langsung dan tidak langsung terkait MBRHAG.

Sejarah Penyebaran Agama, Kondisi Geografi dan Sosial Kabupaten Karimun

Salah satu jejak sejarah yang ada di Pulau Karimun sendiri adalah Prasasti Pasir Panjang yang oleh para ahli ditafsirkan adanya persentuhan dengan dengan agama Budha yang datang dari India sekitar abad ke-9. Jejak budaya lainnya terdapat di Pulau Baru, Pulau Kundur, dan Pulau Moro. Penyebaran agama ini sehubungan dengan dua abad sebelumnya, Sriwijaya pada abad ke-7 menjadi pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Agama Buddha ini pun berkembang juga di daerah-daerah kekuasaannya. Salah satu daerah Kerajaan Sriwijaya yang berada di ujung selatan Malaka adalah Karimun. Daerah ini letaknya sangat strategis, berada tepat di ujung selat Malaka sehingga para musafir dari India yang melintas Selat Malaka ke arah selatan dengan mudah menyinggahi Pulau Karimun (Galba, 2001: 43).

Pada tahun 1414, raja Malaka Parameswara memeluk Islam. Namanya pun berubah menjadi Muhammad Iskandar Syah. Sepuluh tahun kemudian, Parameswara digantikan oleh Sultan Muhammad Syah. Kehidupan masyarakat Malaka termasuk di antaranya daerah Karimun terfokus kepada bidang perdagangan. Karena itu, dalam perkembangannya, masyarakat Karimun secara umum terbagi ke dalam beberapa golongan. Golongan pertama penduduk pribumi, golongan kedua pedagang asing yang menetap di Malaka, dan golongan ketiga santri yang sering kali datang ke kawasan Malaka. Hubungan antar bangsa pun terjalin tidak hanya dengan yang berada di wilayah Nusantara, juga dengan bangsa dari Tionghoa, India, Persia, dan semenanjung Arab hingga terciptalah masyarakat yang kosmopolis. (Galba, 2001: 50). Malaka pada tahun 1511

jatuh ke tangan Portugis. Wilayah kekuasaannya pun menjadi sempit dan berganti nama menjadi Kesultanan Johor yang meliputi Johor, Pahang, Riau, Lingga, dan beberapa daerah lainnya di Sumatera (Galba, 2001: 51).

Sultan Mansyur Syah yang memerintah pada masa tersebut memberi larangan zuriat yaitu keturunan Raja-raja Malaka tinggal di Malaka. Hal itu dilakukan demi menjaga kelangsungan kehidupan keturunannya. Pada masa itu, menurut perkiraan Sultan Malaka apabila Malaka tetap melawan Portugis maka keturunan mereka akan musnah. Mengingat orang-orang Portugis selain memiliki pengaruh yang kuat juga mempunyai peralatan senjata yang lengkap.

Karena suasana yang tidak memungkinkan untuk kembali memerintah seperti semula, akhirnya Sultan Mansyur mengajurkan untuk mencari tempat yang baru yaitu mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di tempat lain. Karena itu, tak lama kemudian muncullah kerajaan-kerajaan seperti ; Kerajaan Indrasakti yang berkedudukan di Pulau Penyengat, Kerajaan Indraloka yang berkedudukan di Tumasek, Kerajaan Indrapura yang berkedudukan di Siak, Kerajaan Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan Kerajaan Indrapuri yang berkedudukan di Langkat. Kelima kerajaan ini merupakan pecahan dari kerajaan Malaka. Sementara itu, rakyat dari kerajaan Malaka juga berpencar dan diantaranya tinggal di Pulau-pulau yang berada di kepulauan Riau termasuk salah satunya adalah Pulau Karimun. Sejak Malaka diduduki Portugis di daerah ini terutama Selat Malaka merupakan tempat pelayaran kapal-kapal dari luar negeri yang berdagang ke Asia Timur. Kapal-kapal dari luar negeri yang berdagang ke Asia Timur.

Pada masa kolonial, dengan latar belakang penguasaan jalur-jalur perdagangan di daerah Riau inilah Karimun sebagai sebuah Pulau yang sangat strategis memegang peranan yang sangat penting pada masa itu. Karena itu, tercatat pernah terjadi pertikaian antara Inggris di sebelah utara dan Belanda di sebelah timur menyangkut status maupun kedudukan pulau-pulau Karimun. Bahkan masalah Karimun pernah menjadi titik puncak pertikaian antara penguasa lokal di daerah Riau pada abad ke-19. Semuanya menunjukkan bahwa Karimun dengan segala kelebihan yang dimiliki selalu menjadi incaran kekuatan besar pada masa itu setelah diketahui adanya jenis bahan tambang yang dapat dieksploitasi di daerah tersebut.

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dalam perkembangannya Kabupaten Karimun khususnya dan Kepulauan Riau umumnya pada tahun 1963 dikenal sebagai “Surga Dolar” karena pada saat itu yang berlaku di daerah ini adalah uang ringgit Malaysia dan dolar Singapura. Namun pecahnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk melakukan dedolarisasi dengan menerbitkan uang Kepulauan Riau (KR) pada tahun 1963. Semenjak itu kehidupan ekonomi di wilayah ini menjadi lesu dan masyarakat pada waktu itu sangat sulit mendapat barang kebutuhan pokok yang sebelumnya didatangkan dari Singapura dan Malaysia.

Adanya desakan terhadap kebutuhan hidup, lahirlah aktifitas ekonomi masyarakat yang dikenal dengan sebutan *semokil* (penyelundupan). Pada mulanya kegiatan ini dilakukan oleh orang-orang melayu yang bekerja sebagai nelayan, namun pada perkembangan selanjutnya

kegiatan *semokil* ini menjadi semakin marak, tidak saja dilakukan oleh orang-orang Melayu secara tradisional melainkan diikuti oleh penduduk lainnya yang mendiami wilayah Kepulauan Riau.

Setelah masa konfrontasi berakhir, bersamaan dimulainya Program pembangunan Nasional Repelita I tahun 1969, ternyata tidak merubah kebiasaan warga penduduk dalam aktivitasnya sebagai penyelundupan, sehingga kawasan ini kembali terkenal sebagai kawasan rawan penyelundupan. Bagi pemerintah kegiatan penyelundupan sangat merugikan sehingga pemerintah berupaya melakukan tindakan pencegahan dengan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pada saat itu adalah dengan menempatkan Kantor Wilayah Bea dan Cukai di Pulau Karimun. Penempatan Kantor Bea dan Cukai ini ternyata dapat memberikan dampak yang positif, selain dapat mencegah berbagai penyelundupan juga dapat memberi lapangan pekerjaan bagi warga setempat sebagai pegawai Bea dan Cukai.

Seiring dengan derap reformasi yang terus bergulir, berbagai aspirasi pun berkembang di masyarakat di antaranya adalah adanya keinginan yang kuat untuk segera memekarkan wilayah mereka yang sebelumnya hanya berstatus setingkat kecamatan. Diawali dengan membentuk Komite Pemekaran Kepulauan Riau (KPKR) tahun 1999 yang melakukan musyawarah di Tanjung Pinang dan melahirkan sebuah deklarasi yang intinya untuk membentuk daerah otonomi pada bekas Kabupaten Kepulauan Riau.

Akhirnya apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Karimun terwujud dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 53 Tahun 1999

tentang pembentukan Kabupaten Karimun serta 35 kabupaten lainnya di seluruh Indonesia yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 4 Oktober 1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 oleh Mendagri di Jakarta. Adapun pejabat pertama Bupati Karimun adalah Drs. H.M. Sani berdasarkan SK Mendagri No. 131.81-1124 sampai dengan 81-115.

Dengan terbentuknya Kabupaten Karimun dan dengan disyahkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, di satu sisi merupakan harapan dan peluang yang sangat terbuka Kabupaten Karimun diberi keleluasaan untuk membangun daerahnya seluas-luasnya, namun di sisi lain merupakan tantangan tersendiri karena dengan demikian segala konsekuensi yang terkait dengan pembiayaan daerah tentunya harus dipenuhi sendiri melalui PAD yang ditargetkan.

Karena itu, terbentuklah Kabupaten Karimun berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kunder. Selanjutnya berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 126 tahun 2001, maka wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 8 (delapan) Kecamatan, dan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 10 tahun 2004 dimekarkan lagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan dan pada akhirnya berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Karimun nomor 12 tahun 2007 dimekarkan lagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 29 kelurahan dan 42 desa, 3778 RW (Rukun Warga) dan 1060 RT (Rukun Tetangga).

Sejarah MBRHAG

Pendirian masjid ini diprakarsai oleh Raja Haji Abdul Ghani. Ia adalah Amir (pemerintah setingkat kecamatan) pertama kerajaan Riau-Lingga di Pulau Buru Karimun, dan sekaligus wakil Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf. Karena itu, untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama masjid tersebut. Namun, Raja Haji Abdul Ghani tidak dikubur di sekitar masjid ini melainkan di kompleks Pemakaman Raja Haji Fi Sabilillah di Pulau Penyengat (wawancara dengan Ketua DKM MBRHAG Daeng Muhammad, 1 April 2016).

Berkenaan dengan tahun pendirian MBRHAG terdapat perbedaan pendapat tentang sejarah pembangunan masjid ini. Menurut Teguh Hidayat, masjid ini dibangun tahun 1823 atau setahun sebelum Traktat London 1824, yang telah menyebabkan pecahnya "Perang Karimun" dan sebelas tahun sebelum masjid Pulau Penyengat dibangun pada tahun 1834. Namun, menurut Anastasia Wiwik Swastiwati masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdulrahman Muazamsyah antara tahun 1883-1911 (Swastiwati, 2007: 9).

Argumentasi Swastiwati sehubungan dengan jabatan Amir pertama kerajaan Riau-Lingga untuk wilayah Pulau Buru yang berkedudukan di Pulau Buru mulai diamanahkan kepada Raja Haji Abdul Ghani setelah tahun 1855. Karena itu, dapat diperkirakan mesjid bersejarah tersebut dibangun setelah tahun 1855, jika diberi rentang masa diperkirakan tahun (1844-1857). Hal ini sebagaimana tulisan dalam surat Yamtuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf kepada Resident Riouw bertanggal 20 Februari 1893. Isi surat ini tentang Raja Haji Abdul Ghani sebagai Amir pertama di Pulau Buru itu yang wafat di Singapura pada 28 Rajab

1310 bertepatan dengan 15 Februari 1893.

Jenazahnya Raja Haji Abdul Ghani diantar oleh Sultan Johor (Sultan Abu Bakar) ke Pulau Penyengat menggunakan kapal api bernama “Seget” milik Sultan Johor, yang diiringi oleh kapal api “Penyengat” milik Yamtuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf. Jenazahnya tiba di Pulau Penyengat 29 Rajab 1310 bersamaan dengan dengan 16 Februari 1893, pukul lima petang, dan “...pada malam chamis itu djoega kita [Raja Muhammad Yusuf] makamkan di Penjengat adanya.” (ANRI. Riouw. 225/5). Dalam perkembangannya, MBRHAG telah mengalami sejumlah restorasi dan perubahan meski tak merubah keseluruhan struktur aslinya. Perubahan yang jelas tampak pada bagian atap dan langit-langit ruangan utama di bawahnya. Seperti dilaporkan oleh Controleur Indragiri, A.F. P. Grafl, pada tahun 1888, mesjid beratap kubah (*koepeldaken*). Namun bila melihat struktur bangunan mesjid itu, tentulah yang dimaksud Graafland bukanlah seperti kubah ‘model bawah’ yang asalnya dari Timur Tengah. Tampaknya orang Belanda ini menyamaratakan semua atap mesjid Melayu sebagai kubah (*koepeldaken*) (Syahri, 2015: 27).

Arsitektur MBRHAG

MBRHAG memiliki menara dengan ketinggian 11 Meter. Menara ini juga berfungsi sebagai mercu tanda bagi Pulau Buru dalam peta laut dan peta pelayaran Kepulauan Riau pada abad 19. Hal ini sebagaimana terdapat dalam peta laut dan alur pelayaran di Riouw-Lingga Archipel (Kepulauan Riau-Lingga) yang dibuat oleh angkatan laut Belanda tahun 1898-1899 dan diterbitkan tahun 1901 di s-Gravenhage (Den Haag) umpamanya, mesjid ini dicantumkan sebagai salah satu mercu

tanda Pulau Buru dan diberi keterangan (Syahri, 2015: 33).

Sebagaimana halnya Masjid Raya Sultan Riau di Pulau Penyengat, MBRHAG juga didominasi warna kuning. Adapun gaya arsitektur Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani di Pulau Buru adalah tipikal masjid-masjid tradisional Melayu di Semenanjung (Mesjid Kampung Keli di Malaka) dan Singapura (Mesjid Sultan yang lama di Kampung Gelam) pada abad ke-19.

Denah bangunan utamanya berbentuk empat persegi yang mencakupi ruangan salat dan teras mesjid dengan ukuran keseluruhan 13 x 12,7 m. Bagian mihrabnya yang menjadi bagian penunjuk arah kiblat dan ruang tempat imam memimpin shalat berjamaah merupakan ruang segi empat: sama seperti mihrab mesjid Kampung Keling di Malaka.

Ruangan utama mesjid ini adalah tempat shalat berjamaah berbentuk bujur sangkar. Di dalamnya terdapat empat buah tiang seri berbentuk bulat (empat buah tiang beton menggantikan tiang lama dari bahan kayu). Keempat tiang ini sekaligus menjadi penopang atap mesjid. Seluruh tiang dan dinding bagian dalam mesjid ini juga didominasi warna kuning diraja dengan kombinasi sedikit warna hijau pada bagian lingkaran profil bagian atas dan kaki tiang.

MBRHAG memiliki lima buah pintu dengan bagian atasnya berbentuk lengkungan yang melengkapi ruangan utama mesjid. Dua buah pintu pada dinding bagian Utara dan Selatan, serta satu pintu utama pada bagian tengah dinding sebelah Timur yang berdepan-depan dengan mihrab menjadi akses keluar masuk jamaah. Dinding sebelah Timur ini, juga dilengkapi dengan dua buah jendela berhiasakan jeruji khas seni bina Melayu.

Menurut Ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid Daeng Muhammad (wawancara 1 April 2016), berdasarkan cerita masyarakat Pulau Buru, tukang yang mengerjakan pembangunan mesjid ini adalah tukang Tionghoa yang didatangkan dari Singapura. Tukang yang sama juga mengerjakan pembangunan kelenteng yang letaknya tak jauh dari mesjid ini.

Secara arsitektural, reka bentuk mesjid ini adalah khas mesjid tradisional Melayu yang populer pada zamannya. Gaya arsitektur mesjid seperti ini tersebar luas di Semananjung dan Singapura pada abad ke 19. Aslinya mesjid seperti ini dibangun dengan struktur seni panggung dan menggunakan kayu. Namun pada abad ke 19, di Pulau Buru, seperti juga di Malaka, struktur bangunannya diubah-suai menggunakan batu dan perekat kapur yang diperkuat dengan putih telur.

Pengaruh seni arsitektur asing, terutama Tionghoa dan Eropa, tampak jelas pada bangunan Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani di Pulau Buru. Hal ini bukan semata-mata karena tukang mahirnya adalah orang Tionghoa yang didatangkan dari Singapura, sebuah tempat yang sangat maju dalam seni arsitektur bangunannya pada abad 19, tapi juga karena pada zaman mesjid tersebut dibangun, seni arsitektur mesjid seperti ini sangat populer.

Salah satu bangunan berseni arsitektur Tionghoa sebagaimana tampak pada menara. Bangunan ini berbentuk silinder dengan diameter lingkaran 6 m dan tinggi menara 14 m, yang makin ke atas semakin meruncing dan pada ketinggian sekitar 7 m dibatasi oleh jalan lingkaran atas. Bentuk puncak menyerupai tempat pembakaran hio di klinteng-klinteng Tionghoa (Sugiharta, 2006: 59).

Adapun pengaruh seni arsitektur Eropa tampak pada tiang-tiang empat persegi dan bulat yang menyangga atap bagian teras. Dalam seni arsitektur klasik Eropa, tiang-tiang seperti ini dikenal sebagai pilar-pilar (*column*) klasik yang disebut Tuscan order, atau gaya Roman-Doric.

Masjid ini menggunakan alas tiang, bagian tubuh tiang polos tidak bergalur, adalah salah satu bentuk tiang paling populer dalam seni bina Melayu abad 19. Selain di Pulau Buru, tiang persegi seperti ini banyak digunakan pada bangunan kolonial di Tanjungbalai, Singapura, Johor, dan Tanjungpinang tempo dulu.

Selain bentuk puncak menara yang dikatakan sebagai pengaruh arsitektur Tionghoa, bagian lainnya yang jelas sekali pengaruh seni interior dalam seni arsitektur Tionghoa adalah sejumlah ventilasi yang sekaligus menjadi hiasan pada dinding ruang, di sekeliling bagian atas ruang mihrab, dan pagar di sekeliling puncak menara masjid.

Ornamen ventilasi tersebut bukanlah terbuat dari batu giok sebagaimana diyakini selama ini. Sesungguhnya, ornamen ventilasi itu adalah keramik berwarna hijau tua yang berasal dari Negeri Tionghoa zaman Dinasti Qing. Keramik jenis ini, dan variannya, diproduksi di daerah Shiwan dekat Guangdong, Tionghoa, dan dikenal luas sebagai keramik Shiwan. Ventilasi keramik seperti ini sangat populer pada zamannya, dan diekspor ke Singapura hingga akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 (Syahri, 2015: 27).

Dari model dan coraknya, kramik ventilasi tersebut berasal dari zaman menjelang akhir kekuasaan Dinasti Qing di Tionghoa, atau sekitar tahun 1880-an hingga akhir abad 1890-an. Diperkirakan, keramik ventilasi ini dibawa ke Pulau Buru dari Singapura

yang pada saat itu adalah salah satu pasar penting keramik Shiwan di kawasan Selat Melaka. Selain menjadi ornamen dan ventilasi Masjid di Pulau Buru, keramik ventilasi sejenis juga digunakan sebagai hiasan pada sejumlah rumah toko tua di Jl. Nusantara (Jl. Besar) di Tanjungbalai, Karimun, yang kebanyakannya dibangun pada akhir abad ke 19 hingga awal abad ke 20. Selain itu, juga digunakan, pada sejumlah bangunan kolonial di Tanjungpinang, dan pada salah satu istana Sultan di Daik-Lingga (Syahri, 2015: 27).

Struktur dan bentuk Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani pada saat ini bila kaidah dalam restorasinya diperhatikan, tidak banyak bedanya dengan bentuk aslinya ketika pertama kali dibangun. Susunan atap limas bertingkat tiga ini dalam seni arsitektur Melayu trades dikenal sebagai gabungan empat bumbung pisang sesikat yang menurus di bagian puncaknya. Jenis atap seperti lazim dipergunakan untuk memayungi masjid atau sebagai atap masjid tradisional Melayu.

Di halaman masjid, terdapat pula dua bangunan penunjang fungsi masjid yang masih relatif terjaga keasliannya. Bangunan pertama, yang letak di sudut sisi selatan bangunan masjid, adalah sebuah kulah atau kolah atau bak air yang berfungsi sebagai tempat mengambil berwudu atau wudu sebelum menunaikan salat, namun kini tidak berfungsi lagi. Ketika masih dipergunakan pada masa lalu, kulah ini diisi air dialiri dari sumber air hingga paras tertentu yang volumenya lebih dari dua kulah. Setiap orang yang akan berwudu akan masuk kedalamnya melalui tangga khusus yang terdapat di keempat sisinya, lalu mencelupkan dan membasuh anggota badan yang wajib dibasuh dalam berwudu.

Bangunan kedua adalah menara setinggi 11 meter yang pada masa lalu berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan, di samping sebagai mercu tanda masjid. Letaknya di sisi halaman masjid yang berdepan-depan dengan bagian mihrab. Di Provinsi Kepulauan Riau, mesjid tua bersejarah yang menggunakan menara dengan berfungsi dan tempat khusus untuk mengumandangkan azan hanya ada di Pulau Buru dan Pulau Penyengat.

Tangga di dalam menara itu akan mengantarkan seorang muazin ke ruang khusus yang terletak di bawah kubah di puncak menara yang dipagari beton berhiaskan ventilasi keramik Shiwan. Satu hal yang menarik, 'teknologi' sistim akustik pada ruangan khusus tempat muazin mengumandangkan azan dari puncak menara itu memungkinkan lantunan azan yang dikumandangkan terdengar jauh hingga ke seluruh Kampung Buru dan sekitarnya pada suatu ketika dulu.

Selain kulah dan Menara juga terdapat bangunan lainnya yang masih terjaga keasliannya. Bangunan pertama, yang letak di sudut sisi Selatan bangunan masjid, adalah sebuah atau bak air yang berfungsi sebagai tempat mengambil berwudu menunaikan shalat, namun kini tidak berfungsi lagi. Ketika masih dipergunakan pada masa lalu, kulah ini diisi air dialiri dari sumber air hingga paras tertentu.

Kulah 1 tempat menyimpan air yang dibuat dari batu; bak air; 2 kamar mandi; kolam kecil; 4 ukuran banyaknya air yang menggenang yang dapat digunakan untuk mencuci dan berwudu (dua kulah ialah banyaknya air yang menurut ukuran 1,25 hasta panjang, lebar, dan tinggi); dibuat bak tempat wudu yang lebih besar yang isinya lebih dari dua kulah.

Di masjid ini juga masih terdapat mimbar lama penuh ukuran yang didominasi warna hijau muda dan

kuning. Mimbar yang diperkirakan sama tuanya dengan usia masjid ini masih berfungsi sebagai tempat khatib membacakan kutbah hingga kini. Adapun letaknya persis di tengah-tengah ruang mihrab. Mimbar ini memiliki 5 (lima) anak tangga. Anak tangga pertama hingga ketiga dari bawah diperuntukkan untuk langkah-langkah kaki khatib sebelum khutbah. Anak tangga keempat untuk injakan kedua kaki khatib. Anak tangga kelima untuk penyangga duduk khatib saat duduk di antara dua khutbah. Menurut Daeng Muhammad, mimbar dengan desain seperti ini merupakan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Ia pun mengemukakan ingatannya tentang hadits yang menyatakan Nabi saat menginjak anak-anak tangga mimbar. Saat menaiki anak-anak tangga sebelum khutbah, Nabi mengucapkan “amin” hingga tiga kali sebagaimana jumlah anak tangga yang diinjak (wawancara 1 April 2016).

Dengan demikian, penjelasan Ketua Umum DKM MBRHAG ini sesuai dengan hadits: “Sesungguhnya Nabi saw. suatu ketika menaiki mimbar. Ketika menginjak anak tangga pertama, beliau mengucapkan *amin*, begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. (Seusai shalat), para sahabat pun bertanya, “Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan *amin* tiga kali”. Beliau menjawab, “Pada waktu menaiki anak tangga yang pertama, Malaikat Jibril a.s datang dan berkata, ‘celakalah dan merugi orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan tetapi tidak sampai terampuni atas dosadossanya.’ Lalu aku berucap *amin*. Kemudian Jibril berkata lagi, ‘celakalah dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi ia tidak sampai bisa masuk surga’. Lalu aku mengucapkan *amin*. Kemudian Jibril berkata lagi, ‘celakalah dan merugi seseorang yang bila namamu disebut ia

tidak mengucapkan shalawat atasmu’. Lalu aku berucap *amin* (H.R. Bukhari).

Peranan MBRHAG dalam Relasi Umat Islam Melayu dengan Buddhis dan Konghuchu Tionghoa di Pulau Buru

Penduduk Kecamatan Buru Karimun Kepulauan Riau berjumlah 11534 jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan jumlah agama terdiri dari Islam: 9966 jiwa, Katholik: 13 jiwa, Protestan: 124 jiwa, Buddha: 1422 jiwa, dan Konghuchu: 6 jiwa. Adapun rumah ibadah yang ada di pulau ini terdiri dari Masjid/Musholla yang berjumlah 23 buah dan cetya/klenteng berjumlah 4 buah (Laporan Data Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buru, Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Maret 2016).

Dari jumlah penduduk berdasarkan sebaran agama yang dianut ini, sebaran anak-anak yang bersekolah di SDN Buru 001 terdiri dari Islam berjumlah 100 orang dan Buddha 84 orang. Sementara itu, di SDN Buru 009 yang menganut Islam berjumlah 95 orang dan Buddha 9 orang (Data diperoleh dari Tati Mesnoriawaty, staf honorer KUA Kecamatan Buru pada 2 April 2016). Adapun anak-anak yang bersekolah di SMPN Buru, satu-satunya sekolah tingkat pertama di pulau ini terdiri dari Islam; 251 orang, Buddha: 23 orang, dan Kristen: 2 orang (Data diperoleh dari Ilyas Masduki, Kepala SMPN Buru pada 2 April 2016).

Salah satu cetya atau vihara mini dan klenteng terletak sekitar 200 meter ke arah kanan MBRHAG. Kelenteng itu bernama Sam Po Teng dan cetya bernama Cetiya Tri Dharma Dewa Bumi. Umur klenteng ini lebih tua dari umur masjid. Klenteng ini dibangun pada tahun 1815 M oleh warga Tionghoa yang berada di Pulau Buru pada waktu itu. Klenteng berdenah persegi dengan atap

berbentuk pelana. Klenteng ini mempunyai tiga buah pintu masuk, dengan pintu utama berada di depan berhadapan langsung dengan jalan.

Dengan demikian, hubungan yang terjalin sekian lama antara Muslim Melayu dengan Buddhis/Konghuchu Tionghoa di pulau Buru juga menjadi salah satu faktor cara pandang pengurus MBRHAG terhadap penganut agama lain berdasarkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Hubungan ini juga terjalin erat sehubungan dengan berdasarkan cerita turun temurun bahwa orang tionghoa yang mengarsiteki bangunan cetiya/klenteng juga mengarsiteki bangunan MBRHAG. Relasi ini juga dapat dikatakan sebagai upaya umat Islam Islam di sana dalam mengamalkan al-Quran surat al-Kaafirun pada ayat *lakum diinukun wa liya diin* (bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku).

Menurut Abdul Kadir (62 tahun), ketua RW kampung Busung dan salah seorang pengurus MBRHAG yang rumahnya di depan masjid ini, saat ia duduk di Sekolah Dasar, ada temannya yang menganut Buddha dan pernah ikut berpuasa dan sama-sama berbuka hingga setengah bulan di bulan Ramadhan (wawancara 3 April 2016). Hubungan antar kedua etnis dan juga berbeda agama ini juga berlangsung pada masa berikutnya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang anak Abdul Kadir, Faizal (23 tahun). Ia menuturkan saat masih bersekolah di SMPN Buru dan berteman dengan para pelajar Tionghoa yang kebanyakan beragama Buddha dan Konghuchu. Hubungan dengan teman-temannya itu juga berjalan harmonis. Sesekali, ia pun dibelikan jajanan oleh teman-temannya yang menganut agama Buddha dan Konghuchu tersebut (wawancara 3 April 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut ini.

Pertama, pendirian MBRHAG diprakarsai oleh Raja Haji Abdul Ghani. Ia adalah Amir (pemerintah setingkat kecamatan) pertama kerajaan Riau-Lingga di Pulau Buru, dan sekaligus wakil Yang Dipertuan Muda Riau Raja Muhammad Yusuf. Adapun arsitekturnya adalah seorang Tionghoa yang beragama Khonghucu. Berkenaan dengan tahun pendiriannya terdapat perbedaan pendapat tentang sejarah pembangunan masjid ini. Menurut Teguh Hidayat, masjid ini dibangun tahun 1823 atau setahun sebelum Traktat London 1824, yang telah menyebabkan pecahnya “Perang Karimun” dan sebelas tahun sebelum masjid Pulau Penyengat dibangun pada tahun 1834. Namun, menurut Anastasia Wiwik Swastiwi masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Abdulrahman Muazamsyah antara tahun 1883-1911 (Swastiwi, 2007: 9). Argumentasi Swastisi ini yang logis sehubungan dengan jabatan Amir pertama kerajaan Riau-Lingga untuk wilayah Pulau Buru yang berkedudukan di Pulau Buru mulai diamanahkan kepada Raja Haji Abdul Ghani setelah tahun 1855.

Kedua, secara umum bangunan MBRHAG terdiri atas tiga bagian, yaitu bangunan induk, menara, dan kolam. Ruang induk berukuran 8,5 x 8,5 meter dengan empat tiang utama penyangga yang terletak di tengah ruangan dengan bentuk empat persegi. Ruang mihrab dilengkapi dengan sebuah mimbar yang terbuat dari kayu. Pada mimbar terdapat tiang sejumlah 6 buah dengan atap berbentuk pelana dan bagian depan berundak-undak yang berfungsi sebagai tempat ceramah. Tiang mimbar

dilengkapi dengan hiasan berupa sulur-suluran pada bagian puncaknya. Bangunan menara di depan masjid ini berbentuk silinder dan bentuk puncak menyerupai tempat pembakaran hio di klenteng klenteng Tionghoa. Di sebelah selatan masjid ini Kolam sebagai tempat berwudhu' berada pada sisi kanan masjid. Ukuran kolam secara keseluruhan adalah 6 x 6 m dengan kedalaman 1,5 m. Kolam berbentuk tanda plus (+) dengan tinggi dari permukaan tanah sekitar 45 cm.

Ketiga, di sebelah kanan MBRHAG sekitar 200 m terdapat Kelenteng Sam Po Teng dan cetya Tri Dharma Dewa Bumi. Umur klenteng konon lebih tua dari umur masjid. Klenteng ini dibangun pada tahun 1815 M oleh warga Tionghoa yang berada di Pulau Buru pada waktu itu. Klenteng berdenah persegi dengan atap berbentuk pelana. Klenteng ini mempunyai tiga buah pintu masuk, dengan pintu utama berada di depan berhadapan langsung dengan jalan. Dengan demikian, hubungan yang terjalin sekian lama antara Muslim Melayu dengan Buddhis/Konghuchu Tionghoa di pulau Buru juga menjadi salah satu faktor cara pandang pengurus MBRHAG terhadap penganut agama lain berdasarkan ajaran Islam dan kehidupan sehari-hari. Hubungan ini juga terjalin erat sehubungan dengan berdasarkan cerita turun temurun bahwa orang Tionghoa yang mengarsiteki bangunan cetya/klenteng juga mengarsiteki bangunan MBRHAG. Relasi ini juga dapat dikatakan sebagai upaya umat Islam di sana dalam mengamalkan al-Quran surat al-Kaafirun pada ayat *lakum diinukun wa liya diin* (bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku). Bahkan, dalam kelangsungan hubungan ini terdapat informasi yang menjelaskan Buddhis Tionghoa ada yang pernah ikut puasa selama setengah bulan Ramadhan. Di

antara mereka juga sesekali ada yang membelikan jajanan untuk teman-temannya yang Muslim saat bersekolah di SMPN Buru yang berdekatan dengan masjid.

Sehubungan dengan pembatasan penelitian ini pada aspek terkait khazanah keagamaan, maka penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi berikut ini.

Pertama, perlu penelitian lanjutan terkait relasi muslim Melayu dengan Buddhis/Konghuchu Tionghoa yang menurut beberapa tokoh dan masyarakat di sana berjalan dengan harmonis. Hal ini juga termasuk di dalamnya penelitian terkait sejarah klenteng Sam Po Teng dan Cetiya (vihara mini) Cetiya Tri Dharma Dewi Bumi. Dengan demikian, hubungan kedua etnis yang berbeda agama ini dapat dijadikan cermin bagi hubungan mayoritas Melayu dengan minoritas Tionghoa. Sebab dalam beberapa bulan terakhir ini hubungan keduanya berujung konflik hingga perusakan Klenteng di Kota Tanjung Balai Sumatera Utara pasca kemarahan seorang Tionghoa terhadap kumandang azan. Dalam skala regional di Asia Tenggara, minoritas muslim juga mengalami penindasan oleh oknum mayoritas Buddhis di Myanmar. Akibatnya, sebagian dari mereka banyak yang bereksodus meninggalkan negeri ini, salah satunya ke Aceh di Indonesia.

Kedua, dalam rangka peningkatan pelayanan kehidupan umat beragama di Pulau Buru, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan ini perlu ditambah. Saat ini pegawai KUA di sana hanya berjumlah dua orang, yaitu kepala KUA dan salah seorang stafnya yang masih berstatus sebagai pegawai honorer.

DAFTAR PUSTAKA

- Galba, Sindu, dan kawan-kawan, *Sejarah Daerah Kabupaten Karimun*, Diparsenbud Kab. Karimun & BKSNT Tanjung Pinang, 2001
- Laporan Data Kantor Urusan Agama, Kecamatan Buru, Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Maret 2016
- Laporan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya se-Kabupaten Karimun, Tahun 2014
- Syahri, Aswandi dan Irwanto, *Khazanah Masjid Bersejarah Bumi Berazam*, DPD BKPRMI Kabupaten Karimun, 2015
- Sugiharta, Sri, *Masjid-Masjid Kuno di Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar, 2006
- Swastiwi, Anastasia Wiwik, *Peninggalan Sejarah dan Obyek Wisata di Kabupaten Karimun*, Majalah *Marwah*, vol 3, No. 5, Th . 2007
- Tugiyono KS, dkk, *Peninggalan Situs dan Bangunan Bercorak Islam di Indonesia*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2006

5. Abdul Kadir (Ketua RW Kampung Busung dan Pengurus DKM Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani, Pulau Buru, Kabupaten Karimun)
6. Faizal (Warga Kampung Busung, Pulau Buru, Karimun)
7. Ilyas Masduki (Kepala SMPN Buru, Karimun)

Informan

1. Suroto (Kasi Sejarah Adat dan Kepercayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun)
2. Anasril (Staf Kementeria Agama Kabupaten Karimun)
3. Tati Mesnoriawaty (Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Kabupaten Karimun)
4. Daeng Muhammad (Kepala DKM Masjid Besar Raja Haji Abdul Ghani, Pulau Buru, Kabupaten Karimun)